PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Oleh:

NUR IHSAN HASIBUAN

NIM. 1640200207

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2021

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Oleh:

NUR IHSAN HASIBUAN
NIM. 16 402 00207

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING II
Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.	Nurul Izzah, M.Si.
NIP.19780818 200901 1 015	NIP.19900122201801 2 003

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nur Ihsan Hasibuan**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 28 Desember 2020
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nur Ihsan Hasibuan** yang berjudul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2016-2018"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP.19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M. Si.
NIP. 19900122201801 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertandatangandibawahini:

Nama	:	**Nur Ihsan Hasibuan**
NIM	:	16 40200207
Fakultas	:	EkonomidanBisnis Islam
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
JudulSkripsi	:	**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2016-2018**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 28 Desember 2020
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
F00BCAHF861343029
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Ihsan Hasibuan
NIM. 16 402 00207

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

SebagaicivitasakademikInstitut Agama Islam NegeriPadangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama	: NUR IHSAN HASIBUAN
Nim	: 16 402 00207
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2016-2018"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Padatanggal : 28 Desember 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0E0CAAHF861343013
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Ihsan Hasibuan
NIM. 16 402 00207

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : **NUR IHSAN HASIBUAN**
NIM : **16 402 00207**
FAKULTAS/JURUSAN : **Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbang Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 20 2018**

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

Sekretaris

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 19841130 201801 2 001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 19841130 201801 2 001

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : **Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal : **Kamis/ 11 Februari 2021**
Pukul : **08. 30 WIB s/d 12.00 WIB**
Hasil/Nilai : **68,25 (C)**
Index Prestasi Kumulatif : **3,48**
Predikat : **Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2016-2018**

NAMA : **NUR IHSAN HASIBUAN**

NIM : **16 402 00207**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 22 Maret 2021
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Nur Ihsan Hasibuan

NIM : 16 402 00207

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2016-2018

Wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah di Sumatera Utara tahun 2016-2018 menunjukkan adanya ketergantungan fiskal dan bantuan pemerintah pusat, melalui dana perimbangan. Mengingat kedudukan Pendapatan Asli Daerah tergolong rendah terhadap penerimaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Utara dan ketersediaan sumber daya manusia di tingkat daerah masih sangat minim karena pendapatan asli daerah belum mampu mendorong peningkatan belanja daerah serta masih bergantung kepada dana kiriman dari pemerintah pusat. Maka penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai variabel independen dan belanja daerah sebagai variabel dependen. Adapun tujuannya untuk mengetahui apakah ada pengaruh kedua variabel tersebut terhadap belanja daerah di Sumatera Utara tahun 2016-2018.

Pembahasan penelitian ini didukung oleh teori para ahli yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut menurut peraturan daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah yaitu segala pengeluaran pemerintah daerah pada periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 39. Untuk mempermudah proses analisis data penelitian ini maka dibantu dengan program *Eviews* versi 10.

Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,968317 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mampu menjelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 96,83 persen. Sedangkan sisanya 3,17 persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2016-2018"**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Nurul Izzah, S.E., M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah, S.E., M. Si., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Paharuddin Hasibuan dan Ibunda tercinta Yanti Liana Siregar yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Beliau selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Pachrul Roji Hasibuan, Aulia Sani Hasibuan, Anwar Sadat Hasibuan, Kamis Siregar, Hafnidawati Dalimunthe, Miftahul Hidayah Hasibuan, Siti Ropiah Hasibuan, Suaida Hasibuan, Surya Romadhon Hasibuan selaku adik, kakak, dan paman peneliti, yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Ira Widya Putri, Risca Armitha Tambunan, Deni Amiyanti, Saina Lukita Gucci, Sisi Harianti, serta sahabat peneliti di masa perkuliahan yaitu, Nur Hafni, Juli Anita, Patimah Mandar, Meliani Saskia, Evi Rosida, Evi Dwi Yanti, dan sahabat di Pesantren yaitu, Riski Julita Siregar, Juni Pitriani Siregar, Azmi Rizki Tanjung, Nur Masitoh Tanjung, Annisa Fitri Rambe, dan Mun Ima Hasibuan, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2016, teman-teman seperjuangan KKL Kelompok 21 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, Desember 2020
Peneliti,

NUR IHSAN HASIBUAN
NIM. 16 402 00207

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkapb ahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah danya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....ى	fatḥahdanalifatau ya	ā	a dangarisatas
..ِ..ى	Kasrahdanya	ī	I dangaris di bawah
...ُو	ḍommah danwau	ū	u dangaris di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah*mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah.*

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalamsistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaanhuruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber:Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Identifikasi Masalah** 13
- **C. Batasan Masalah** 13
- **D. Definisi Operasional Variabel** 14
- **E. Rumusan Masalah** 15
- **F. Tujuan Penelitian** 15
- **G. Kegunaan Penelitian** 16
- **H. Sistematika Pembahasan** 17

BAB II LANDASAN TEORI

- **A. Kerangka Teori** 19
  - 1. Pendapatan asli daerah 19
    - a. Pengertian pendapatan asli daerah 19
  - 2. Dana perimbangan 22
    - a. Pengertian dana perimbangan 22
  - 3. Belanja daerah 23

a. Pengertian belanja daerah 23
b. Sumber-sumber pendapatan negara 24
c. Sumber pendapatan negara dalam Islam 26
4. Hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah 30
5. Hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah 30
B. Penelitian Terdahulu 31
C. Kerangka Pikir 35
D. Hipotesis 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
B. Jenis Penelitian 38
C. Populasi dan Sampel 38
1. Populasi 38
2. Sampel 40
D. Jenis dan Sumber Data 42
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Analisis Data 43
1. Uji Estimasi Data Panel 43
a. *Common effects model* 43
b. *Fixed effects model* 43
c. *Random effects model* 44
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 45
a. Uji Chow 45
b. Uji Husman 45
c. Uji LM (*Long Multiplier* 45
3. Pengujian Asumsi Klasik 46
a. Uji Normalitas 46
b. Uji Multikoleniaritas 46
c. Uji Heteroskedastisitas 47

d. Uji Autokorelasi 47
4. Analisis Regresi Linier Berganda 48
5. Uji Hipotesis 49
1. Uji t 49
2. Uji F 49
3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 49
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara 52
1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara 52
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 53
a. Visi Provinsi Sumatera Utara 53
b. Misi Provinsi Sumatera Utara 53
B. Deskripsi Data Penelitian 55
C. Analisis Data Penelitian 58
1. Uji Estimasi Data Panel 58
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 59
a. Uji *Chow* 59
b. Uji Hausman 60
3. Uji Asumsi Klasik 60
a. Uji Normalitas 60
b. Uji Multikolinearitas 62
c. Uji Heteroskedastisitas 62
d. Uji Autokorelasi 64
4. Uji Hipotesis 65
a. Uji t (Parsial) 65
b. Uji F (simultan) 66
c. Koefisien Determinasi (R^2) 67
5. Hasil Estimasi Regresi Berganda 68
D. Pembahasan Hasil Penelitian 70

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ····· 71
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah ····· 72
3. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah ····· 73

E. Keterbatasan Penelitian ····· 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ····· 75

B. Saran ····· 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Definisi Operasional Variabel 11

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... 25

Tabel III.1 Nama-Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara..... 33

Tabel III.2 Pemilihan Sampel 35

Tabel III.3 Daftar Sampel Penelitian 35

Tabel IV.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018..... 49

Tabel IV.2 Uji Model Estimasi 53

Tabel IV.3 Hasil Uji *Chow*..... 54

Tabel IV.4 Hasil Uji Hausman..... 55

Tabel IV.5 Grafik Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B)..... 56

Tabel IV.6 Hasil Uji Multikolinearitas 57

Tabel IV.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 58

Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi 59

Tabel IV.9 Hasil Uji t..... 60

Tabel IV.10 Hasil Uji F..... 61

Tabel IV.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 62

Tabel IV.12 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 5

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian 30

Gambar III.1 Kerangka Uji Penelitian 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Daerah-daerah provinsi terbagi atas beberapa Kabupaten serta Kota. Tiap daerahnya tentu tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Otonomi dilandaskan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dilandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan digantikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Daerah otonomi yaitu daerah yang dapat mengatur ataupun mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri tanpa adanya keikutsertaan dari pemerintah pusat. Adapun kegunaan dari kebijakan otonomi daerahadalah untuk menunjang kemandirian daerah dan memperbaiki transparasi maupun akuntansi publik mengenai pengaturan keuangan daerah, meningkatkan revonsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan keikutsertaan publik dalam pembangunan suatu daerah, meningkatkan efisiensi maupun efektifitas dalam mengelola keuangan serta pelayanan publik, dan mendorong demokratis dalam daerah.[1] Penerapan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah termasuk kearifan yang dianggap sangat demokratis untuk menyelesaikan prospek desentralisasi yang sebenarnya. Desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan dan tanggungjawab tugas-

[1]Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 2.

tugas publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.[2] Otonomi daerah merupakan kekuatan daerah otonom dalam mengelola dan mengusahakan kebutuhan ataupun keperluan masyarakat sekitar berdasarkan gagasan sendiri tergantung keinginan masyarakat berdasarkan dengan sistem perundang-undangan.[3]

Pemerintah diberi peluang yang sebesar-besarnya pada era desentralisasi fiskal dalam membangun daerahnya sesuai dengan kehendak daerahnya masing-masing. Kesempatan seperti ini belum ada pada masa orde baru, yang sudah terealisasi malah sebaliknya yaitu adanya ketidakmampuan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai belanja daerah atas keterkaitan fiskal dan subsidi maupun pertolongan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan tugas yang ditanggung dalam jangka panjang meningkatnya APBD. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong berkembangnya dunia usaha oleh Pemerintah Daerah, maka kondisi seperi ini dapat terjadi. Adapun dampak positif yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah dari berkembangnya perekonomian yaitu dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatnya PAD, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Namun selama desentralisasi fiskal ini diterapkan, belum ada dampak yang dapat dirasakan selama dua tahun pelaksanaan. Kecenderungan meningkat bahkan penurunan ketergantungan

[2]Suwandi, *Desentralisasi Fiskal* (Yogyakarta: DeePublish, 2015), hlm. 87.

[3]Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik: Suatu PengantarAkutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 338.

terhadap pembiayaan belum terlihat.[4] Oleh karena adanya ketergantungan yang semakin meningkat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat maka keduanya belum dapat dipisahkan.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari sisi angka masih mengalami masalah karena relative tingginya ketergantungan keuangan dari kiriman dana perimbangan oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah sehingga menyebabkan proporsi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan hanya bisa membiayai Belanja Daerahnya sebesar 11,37% sedangkan Dana Perimbangan kontribusinya dalam membiayai Belanja Daerah sebesar 88,63 % di tahun 2004-2006.[5] Kuncoro mengemukakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah hanya dapat memberikan biaya belanja pemerintah daerah maksimal 20%. Hal tersebut menggambarkan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana kiriman dari pemerintah pusat". Menurut Mardiasmo"kemampuan pemerintah daerah guna meningkatkan kemampuan daerahnya belum terlalu signifikan". Keberhasilan dalam mengelola APBD masih kurang kreatif sehingga menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menyebabkan otonomi daerah belum terwujud. Maka peneliti menyimpulkan bahwa dilihat dari segi pembangunan daerah masih kurang maksimal.

---

[4]Muammil Sun'an, dan Abdurrahman senuk, *Ekonomi Pembangunan daerah* (Jakarta: Mitra Wacna Media, 2015), hlm. 66.

[5]Gregorius N. dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisi Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008", *Jurnal Tema Telaah Manajemen,* Issn 1693-9727" Vol 6 Edisi 1 (March 2009): hlm. 34.

Pada konteks ini peneliti akan meneliti besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pengeluaran atau belanja daerah dan mana yang sangat kuat pengaruhnya terhadap Belanja Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerahnya lebih tinggi maka kabupaten/kota tersebut sudah mampu mandiri atau dapat dikatakan sudah sukses dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran daerahnya sendiri dapat dikatakan otonom. Kemudian jika Dana Perimbangan lebih tinggi dibanding Pendapatan Asli Daerah, maka kabupaten atau kota tersebut belum mampu sepenuhnya mandiri dalam mengurus pendapatan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Berikut ini gambar perbandingan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotadi Sumatera Utara:

Gambar I.1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

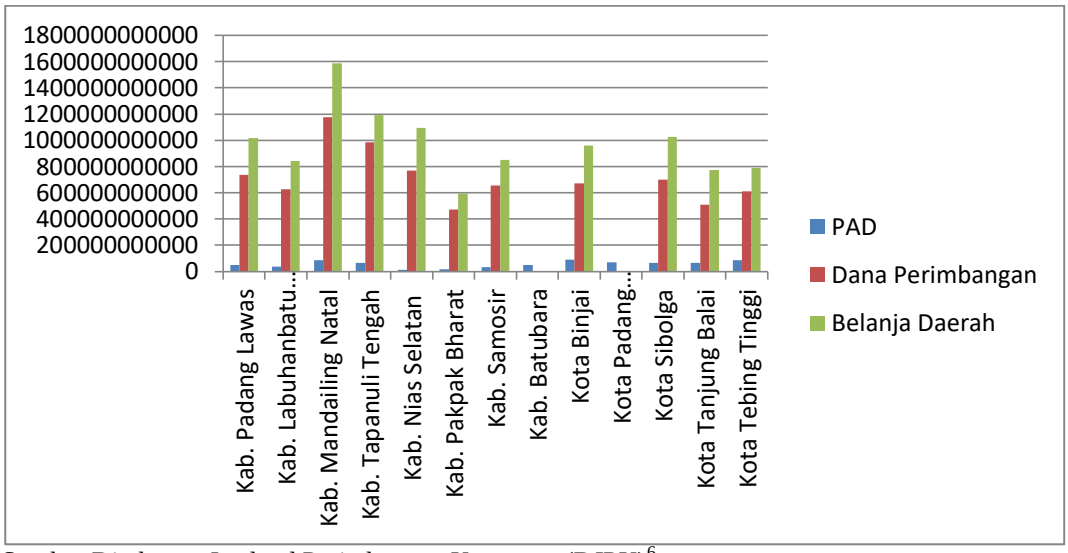

Sumber:Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)[6]

Berdasarkan gambar dapat simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada tahun 2016, seperti di Kabupaten Padang Lawas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah hanya Rp49.991.246.695 dibanding dengan jumlah Dana Perimbangan Rp737.068.004.160 yang lebih tinggi peranannya terhadap nilai Belanja Daerah sebesar Rp1.015.270.384.579 begitu juga dengan Kabupaten Pakpak Barat yang seharusnya mampu menutupi Belanja Daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah namun masih mengandalkan Dana Perimbangan. Nilai Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp15.235.186.682 sedangkan nilai dari Dana Perimbangan Rp471.608.560.542 dengan nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp594.377.863.610 dan di Kota

[6]*www.djpk.kemenkeu.go.id.*

Padang Sidempuan juga demikian masih bergantung terhadap Dana Perimbangan dalam memenuhi belanja daerahnya dilihat dari nilai Dana Perimbangan sebesar Rp508.997.533.000, nilai Pendapatan Asli Daerahnya Rp69.107.801.380 dan Belanja Daerahnya sebesar Rp772.196.268.720 dan Kota Tanjung Balai juga demikian jumlah Dana Perimbangannya Rp584.353.924.000 Pendapatan Asli Daerahnya Rp63.898.624.189 kemudian Belanja Daerahnya sebesar Rp720.036.003.766 dan nilai Pendapatan Asli Daerah terendah pada Kabupaten Nias Selatan Rp14.110.806.475 dengan Dana Perimbangan sebesar Rp768.553.804.000 dengan Belanja Daerah Rp1.093.581.486.484.

Gambar I.2
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

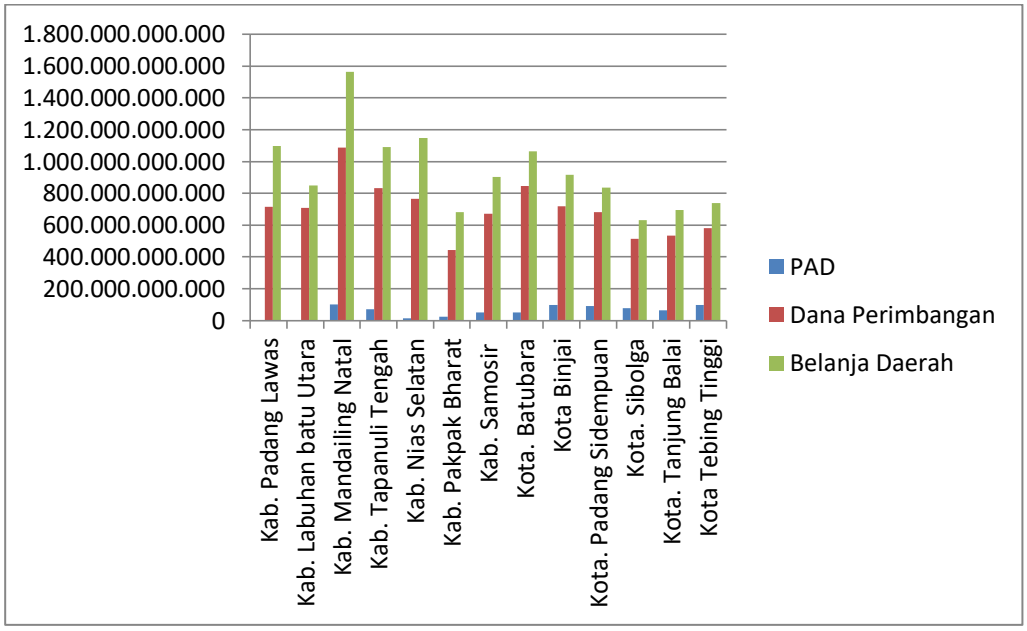

Sumber:Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)[7]

[7] *www.djpk.kemenkeu.go.id.*

Berdasarkan gambar dapat simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah pada tahun 2017 mengalami fluktuasi, seperti di Kabupaten Labuhan Batu Utara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah hanya Rp43.182.972.000 dibanding dengan jumlah Dana Perimbangan Rp707.636.391.000 yang lebih tinggi peranannya terhadap nilai Belanja Daerah sebesar Rp849.301.959.825 begitu juga dengan Kabupaten Pakpak Barat yang seharusnya mampu menutupi Belanja Daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah namun masih mengandalkan Dana Perimbangan. Nilai Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp24.297.176.000 sedangkan nilai dari Dana Perimbangan Rp442.967.749.000 dengan nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp681.429.146.086 dan di Kota Padang Sidempuan juga demikian masih bergantung terhadap Dana Perimbangan dalam memenuhi belanja daerahnya dilihat dari nilai Dana Perimbangan sebesar Rp680.139.010.000 nilai Pendapatan Asli Daerahnya Rp91.296.998.872 dan Belanja Daerahnya sebesar Rp836.868.161.454 dan Kota Sibolga juga demikian jumlah Dana Perimbangannya Rp514.771.430.863 Pendapatan Asli Daerahnya Rp78.454.412.503 kemudian Belanja Daerahnya sebesar Rp631.329.596.721 dan nilai Pendapatan Asli Daerah terendah pada Kabupaten Nias Selatan Rp14.160.411.140 dengan Dana Perimbangan sebesar Rp763.539.781.854 dengan Belanja Daerah Rp1.147.761.807.054.

Gambar I.3
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

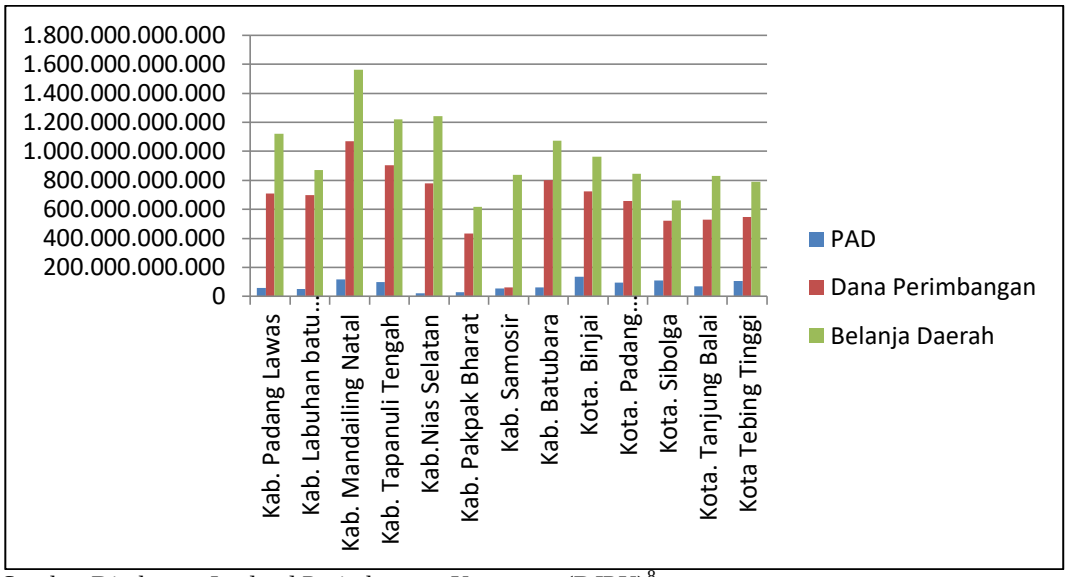

Sumber:Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)[8]

Berdasarkan gambar dapat simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah pada tahun 2018 mengalami fluktuasi, seperti di Kabupaten Mandailing Natal Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah hanya Rp117.661.769.563 dibanding dengan jumlah Dana Perimbangan Rp1.071.095.267.000 yang lebih tinggi peranannya terhadap nilai Belanja Daerah sebesar Rp1.562.169.384.565 begitu juga dengan Kabupaten Pakpak Barat yang seharusnya mampu menutupi Belanja Daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah namun masih mengandalkan Dana Perimbangan. Nilai Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp28.169.647.917 sedangkan nilai dari Dana Perimbangan Rp431.431.968.000 dengan nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp617.103.922.495 dan di Kota Padang Sidempuan juga demikian masih bergantung terhadap Dana Perimbangan dalam memenuhi belanja daerahnya

[8]*www.djpk.kemenkeu.go.id.*

dilihat dari nilai Dana Perimbangan sebesar Rp656.286.589.000 nilai Pendapatan Asli Daerahnya Rp93.313.756.578 dan Belanja Daerahnya sebesar Rp843.757.926.950 dan Kota Sibolga juga demikian jumlah Dana Perimbangannya Rp520.914.768.000 Pendapatan Asli Daerahnya Rp108.129.370.832 kemudian Belanja Daerahnya sebesar Rp662.651.416.580 dan nilai Pendapatan Asli Daerah terendah pada Kabupaten Nias Selatan Rp21.079.236.300 dengan Dana Perimbangan sebesar Rp779.937.244.000 dengan Belanja Daerah Rp1.242.459.520.511.

Peristiwa ini bertolak belakang dengan banyaknya pemekaran beberapa daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dimana tujuan mengotonomkan suatu Kabupaten/Kota agar dapat mandiri baik secara finansial, sosial dan ekonomi. Tulang punggung pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, kemampuan melaksanakan ekonomi mampu di ukur dari sebesar apa sumbangan Pendapatan Asli Daaerah terhadap APBD. Jika sumbangan yang diberikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah semakin besar maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil sehingga otonomi daerah dapat terwujud.[9] Sedangkan apabila pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah semakin kecil maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka akan semakin besar.

Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu melakukan pembangunan daerah belum dapat terlepas dari berhasil

[9]Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 12.

tidaknya pengelolaan APBD secara efektif dan efesien, sedangkan jika pengelola APBD tidak baik akan berakibat terhambatnya kinerja pemda untuk memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pemda dibebankan pada total belanja daerah yang kecil namun memikul kebutuhan yang besar. Namun di waktu yang sama pemda belum terampil dalam mengelolah APBD, sehingga pemerintah tidak optimal dalam mengelola APBD di atas pemrov atau pusat.

Halim dan Abdullah mengemukakan bahwa "90-95% total penerimaan pemerintah daerah untuk mengelola APBD berasal dari dana perimbangan. Hal ini menggambarkan besarnya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat"[10]

Terdapat 2 daerah yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah-nya dibawah 10% dan 8 daerah penerimaan presentase Pendapatan Asli Daerah-nya di atas 50%. Hal tersebut membuktikan bahwa kebanyakan dari daerah belum menunjukkan kemandiriannya sehingga tetap bergantung terhadap pusat dalam hal membiayai seluruh kewajiban yang berhubungan dengan pembangunan. Sampai tahun 2016 dari catatan yang ada bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah menurut provinsi hanya sampai 37,8% dari seluruh jumlah pendapatan daerahnya masing-masing dan presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerahnya yang sampai 70% belum ada.

Nafsi Hartoyo menyatakan bahwa "kurangnya rasa kepekaan daerah untuk menemukan kelebihan dari budaya maupun kemampuan asli daerah,

[10]Abdullah, dkk, "Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan'. Jurnal Akuntasi Pemerintah" Vol. 2, No. 2 (November 2006).

kurangnya kepatuhan atas wajib pajak yang relative rendah, minimnya sistem hukum serta administrasi pendapatan daerah, lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia mesin, adanya birokrasi atas kegagalan dalam mengoperasikan programnya, hasil yang mungkin terwujud tidak optimis, dan biaya pengeluaran yang sering dinaikkan (*markup*) sejak awal pada setiap anggarannya".[11]

Adapun Mardiasmo basri dalam jurnal Masayu Rahma wati dan Catur Martian Fajar menyatakan bahwa "wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah menunjukkan adanya ketergantungan fiskal serta subsidi dan bantuan pemerintah pusat". Mengingat kedudukan Pendapatan Asli Daerah tergolong rendah terhadap penerimaan APBD kota/kabupaten serta ketersediaan sumber daya manusia di tingkat daerah masih dikatakan minim karena pendapatan asli daerah belum mampu mendorong peningkatan belanja daerah serta sepenuhnya tidak dapat menunjang kemandirian daerah dan masih ketergantungan kepada dana kiriman dari pemerintah pusat. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan dari berbagai sumber pendapatan asli daerah. Karena kenaikan dari pajak daerah termasuk penerimaan yang didapatkan dari pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan serta pedesaan yang di ikuti meningkatnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dewi menyatakan bahwa:

[11]Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm 121-122.

> "Pemerintah daerah mempunyai posisi kebebasan rendah untuk mengatur keuangan daerah karena rasio pendapatan asli daerah yang rendah dan minimnya pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah menjadi hambatan yang diterima pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi daerah".[12]

Pembangunan ekonomi daerah masih dihadapkan pada masalah-masalah yang menghambat daerah dalam proses pembangunan yang berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi terutama kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah tersebut di antaranya adalah belanja daerah masih banyak dipergunakan guna membiayai belanja sehari-harinya (belanjanya tidak produktif) yang menjadikan belanja modal dapat menambah asset atau infrastruktur penggerak roda perekonomian daerah di nomor 2 kan, serta kurang menggali potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Untuk dapat terwujudnya otonomi daerah yang dinamis, nyata, serasi, dan betanggungjawab serta agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong ke era perekonomian global maka harus meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, perubahan manajemen keuangan daerah yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah atas pemerintah pusat.[13]

Hampir dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara cenderung bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, dimana ini bertolak belakang dengan tujuan dari otonomi (pemekaran)

---

[12]Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", Jurnal Kajian Akuntansi" Vol. 1, (1) (2017), hlm. 68.

[13]Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, hlm. 80.

daerah yaitu mandiri dalam mengelola sumber daya daerahnya, pembangunan infrastruktur dan pengeluaran daerah lainnya. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul**"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2016-2018"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis judul proposal akan membahas tentang apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara tahun 2016-2018.

1. Terjadi fluktuasi pada Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2018
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Daerah tahun 2016-2018 cenderung menurun.
3. Tingkat kontribusi Dana Perimbangan pada Belanja Daerah tahun 2016-2018 selalu meningkat.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini berguna untuk memfokuskan persoalan yang akan diteliti dari beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut. Peneliti membatasi masalahnya hanya pada:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP)terhadap Belanja Daerah di SumateraUtara tahun 2016-2018.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah sebuah definisi yang menerangkan secara jelas serta akurat suatu variabel yang bisa diukur. Bisa dikategorikan sebagai penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel pada penelitian ini bisa dilihat pada Tabel.2, di bawah ini.

Tabel I.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut berdasar pada peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.[14]	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah.[15]	Rasio
Dana Perimbangan (X_2)	Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepadadaerah untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.[16]	1. Sumber dari APBN 2. Kebijkan desentralisasi.[17]	Rasio

[14]Muhammad Iqbal Dan Widhi Sunardika, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode Tahun 2009-2015)", Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi." Volume 9 No 1, (April 2018): hlm. 11.

[15]Muhammad Iqbal Dan Widhi Sunardika, hlm. 14.

[16]Ida bagus badjra, dkk, "'Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali', dalam jurnal akuntansi indonesia," Volume 6, No 1, (Januari 2017): hlm. 34.

[17]Ida bagus badjra, dkk, hlm. 34.

Belanja Daerah (Y)	Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang termasuk kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.[18]	1. Belanja langsung (belanja modal) 2. Belanja tidak langsung (belanja pegawai).[19]	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018 ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018 ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2016-2018 ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018.

---

[18]Irfan Ferdiansyah, dkk, "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, dalam jurnal feb unmul," Volume 14, No 1 (2018): hlm. 3.

[19]Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah Dalam Jurnal Akuntansi Universitas Udayana," Volume 25, No 2, (November 2018): hlm. 11.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018.

G. Kegunaan Peneliti

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter pada sektor pajak yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini dapat berguna untuk pihak IAIN sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan penelitian berikutnya, yang akan membahas hal-hal yang sama dengan judul ini.

3. Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pemerintah daerah guna mengelola dana transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah secara proporsional serta disajikan dengan transparan sehingga terwujudnya *good governance*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini ialah:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah dan fenomena yang diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Identifikasi Masalah, memuat segala variabel yang terkait dengan variabel penelitian yang akan diteliti khususnya variabel dependen. Batasan Masalah berisi agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah tidak meluas. Defenisi Operasional Variabel, memuat istilah setiap variabel yang dibatasi atau dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti. Rumusan Masalah, yaitu rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti, akan dicarikan cara penyelesaiannya lewat penelitian. Tujuan Penelitian, penelitian, hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya.

BAB II LANDASAN TEORI, memuat tentang teori di dalamnya terdiri dari beberapa bagian; kerangka teori, berisi konsep atau teori yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan variabel penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan tujuan agar penelitian yang diangkat bukan merupakan pandangan tetapi penelitian yang dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang baru.Kerangka pikir merupakan kerangka yang dikemukakan peneliti untuk dapat memperjelas adanya pengaruhantaravariabel independenterhadap variabel dependen.

BAB III METODE PENELITIAN, yang menerangkan metode penelitian yang dipakai pada penulisan proposal yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang akan diteliti, jenis penelitian menerangkan jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian. Pada populasi dan sampel, memuat keseluruhan objek yang akan diteliti setelah itu memperkecil jumlah populasi yang akan diteliti dengan metode sampel untuk mempermudah peneliti. Teknik pengumpulan merupakan penjelasan mengenai data yang digunakan dan cara pengumpulan data oleh peneliti. Analisis data menjelaskan teknik/rumus yangdigunakan dalam menganalisi data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel.

BAB IV, HASIL PENELITIAN menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang akan dilakukan peneliti, selanjutnya peneliti membuat deskriptif variabel penelitian yaitu agar lebih jelas peneliti memberikan gambaran berupa tabel yang akan membuat perkembangan masing-masing variabel. Dan menjabarkan hasil analisis data yang diolah dengan bantuan program Eviews versi 10 setelah itu peneliti membahas hasil penelitian yang telah diolah menggunakan Eviews versi 10.

BAB V, PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan serta saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang terdapat dalam penutup yaitu menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini setelah menganalisis data serta mendapatkan hasil dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undamg Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, setelahnya disebut PAD yaitu pendapatan yang didapatkan daerah yang dikumpulkan menurut peraturan daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo, dalam jurnal Puja Rizqy Ramadhan menyatakan bahwa "pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".[20]

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah akan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang ada pada pemerintah daerah.[21] Pendapatan asli daerah yaitu sumber penerimaan yang didapatkan dari kekayaan asli daerah yang di tarik pemerintah daerah berdasarkan peraturan, jumlah penerimaan serta kenaikan peran PAD yang meningkat akan membuat kemandirian daerah meningkat

[20]Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm. 8.

[21]Dimas Dwi Anngoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 18.

yang menjadikan daerah tidak ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.[22] Maka dari itu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan daerah itu sendiri serta di atur oleh pemerintah setempat dan dimana hasil pengelolaannya untuk suatu daerah tersebut.

1) Pajak Daerah

Pajak merupakan tarif dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) sesuai dengan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayar dengan tidak memperoleh prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) dengan langsung, yang hasilnya dipergunakan guna membiayai pengeluaran Negara demi penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Pajak disebut juga sebagai bayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah menurut Undang-Undang yang berlaku serta dimana hasil dari iuran wajib tersebut digunakan dalam membiayai daerah tersebut.

Hal ini menjelaskan bahwa pajak merupakan bayaran wajib yang dibebankan sesuai dengan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban serta untuk yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan pemaksaan, alasan diberlakukan peraturan seperti hal tersebut agar kas Negara selalu berisi uang pajak. Sementara pihak yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang akan

[22]Nihayatul Fitriana dan Sudarti Sudarti, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Ekonomi" Volume, 2 (2018): hlm. 337.

menjamin pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menentukan besarnya pajak.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu kutipan daerah atas pembayaran jasa ataupun pengijinan tertentu yang dipersiapkan dan ataupun diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan individu ataupun badan.[23] Retribusi daerah yang selanjutnya disebut tarif daerah sebagai pelunasan atau bantuan maupun pelimpahan persetujuan khusus yang terpilih dan dipersiapkan oleh pemerintah daerah demi keperluan orang pribadi maupun badan.[24]

Menurut peneliti Retribusi daerah juga merupakan penyetoran akan bantuan atas pemberian izin yang dibagikan oleh pemerinta hagar mendapatkan balas jasa langsung untuk hajat individu dan badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, pemerintah/BUMN dan swasta ataupun kelompok usaha masyarakat adalah jenis dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisah adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari pengelolaan APBD.

---

[23]Halim, Abdul, *Bunga Rampai Managemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001).

[24]Muhammad Zain dan Suryo Hermana, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan* 2010 (Jakarta: PT Indeks, 2010), hlm. 319.

2. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan terhadap daerah guna mendanai kebutuhan daerah untuk rangka pelaksanaan Desentralisasi.[25] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Daerah, yang dikatakan perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah yaitu sebuah sistem pembiayaan dalam rangka negara kesatuan yang terdiri atas pembagian keuangan pemerintah pusat serta daerah dan pemerataan proporsional, adil, demokratis, serta transparan yang mempertimbangkan potensi, keadaan serta kebutuhan daerah seiringan dengan kewajiban serta pembagian kewenangan dan tata cara pelaksanaan kewenangan, merupakan pengelolaan pengawasan keuangan.

Menurut Darise dalam jurnal Akuntansi Universitas Udayana menyatakan bahwa "Agar tercipta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Dana Perimbangan. Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah guna membiayai keperluan daerah untuk melaksanakan desentralisasi

[25]Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Dana Perimbangan dan pengelolaan keuangan daerah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2006), hlm. 142.

yang berguna untuk membuat keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah".[26]

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).[27] Maka peneliti mengambil keputusan bahwa Dana Perimbangan yaitu pendapatan daerah yang didapatkan dari APBN agar terlaksananya kewajiban suatu daerah agar terwujudnya pelayanan publik yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat.

3. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Menurut Halim, dalam jurnal Muhammad Nur belanja daerah yaitu kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih.[28] Menurut Kawedar, dkk dalam Jurnal Fabdwi Suryani dan Eka Pariani Belanja Daerah yaitu perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan dengan adil serta merata supaya relatif mampu dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, terutama untuk pemberian pelayanan umum.[29] Mardiasmo juga mengartikan bahwa belanja daerah yaitu segala pengeluaran pemerintah daerah pada periode anggaran tertentu yang

---

[26]Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah Dalam Jurnal Akuntansi Universitas Udayana," hlm. 7.

[27]Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 137.

[28]Muhammad Nur, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan" Volume 5, Nomor 1 (Juni 2015): hlm. 80.

[29]Febdwi Suryani dan Eka Pariani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi" Volume 6, No 1 (2018): hlm. 12.

merupakan beban daerah, serta digunakan provinsi maupun kabupaten/kota untuk membiayai terlaksananya urusan pemerintah yang merupakan kewenangan pemerintah dalam satu bidang tertentu dalam pemerintah daerah berdasarkan ketetapan perundang-undangan.

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan termasuk kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh daerah.[30] Belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berupa urusan wajib serta urusan pilihan yang disahkan berdasarkan ketetapan undang-undang.[31]

b. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

1) Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.

---

[30]Rihfenti Ernayani "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan" Volume. 1, No. 1 (2017): hlm. 46.

[31]*Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A.P.B.D)* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2012), hlm. 23.

a. Pajak Pusat

a) Pajak penghasilan (PPh)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

e) Bea Materai

f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

g) Bea Masuk

h) Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya

b. Pajak Daerah

a) Pajak daerah propinsi

b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

2) Pendapatan non pajak

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. Pendapatan non pajak berasal dari:

a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin)

b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaandan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan)

c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari

BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN)

d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)

e. Penerimaan berdasarakan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda)

f. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuanhibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)

g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri. [32]

c. Sumber Pendapatan Negara dalam Islam

Sumber pendapatan dan penerimaan pada zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin yaitu pajak. Pajak itu sendiri dikenal dengan nama *zakat*, dan diperkenalkan pada tahun ke 8 Hijriah di awal-awalmasa

[32]Muda Markus, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 493.

pemerintahan Islam dengan zakat yang dikumpulkan dengan hasil peternakan, bentuk uang tunai, serta hasil pertanian.[33]

Hasil pendapatan pemerintah Islam itu sendiri bersumber dari pajak yang kemudian Struktur Pendapatan itu sendiri terdiri dari:

1) Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

2) Infaq

Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tak mengenal nishab.

3) Sedekah

Sedekah berasal dari kata (*shadaqa*), yang berarti benar. Ia adalah pembenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya,yang diwujudkan dalam pengorbanan materi.

4) Fai

Fai adalah harta-harta yang didapatkan dari non muslim dalam keadaan dalam, atau setelah berakhir peperangan seperti jizyah, kharaj dan lain sebagainya.

---

[33]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 112.

5) Ghanimah

Ghanimah adalah pendapatan Negara yang di dapat dari kemenangan perang. Penerapan uang yang bersumber dari ganimah ini terdapat ketetapannya dalam Al-Qur'an. Alokasi ghanimah empat perlimanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur, sedangkan seperlimanya merupakan khums (harta rampasan perang).

6) Kharaj

Dalam penjelasan perincinya, *Ash-Shawafi* ini sebenarnya merupakan harta tanah takhlukkan yang ditetapkan oleh *baitul mal*.Tanah yang dimaksud merupakan tanah yang tidak berpemilik, tanah para panglima perang, tanah para raja, tanah yang pemilkinya lari dalam perang.

7) Ushur

Ushur yaitu salah satu sumber pendapatan Negara. Pada mulanya ushur adalah pajak perdagangan yang diperoleh untuk pedagang nonmuslim yang melaksanakan perdagangan di Negara Islam.

8) Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang ada dinegara islam sebagai biaya perlindungan

yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial. Dengan kata lain, jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.[34]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[35]

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang

[34]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 103.

[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm, 65.

lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

4. **Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah**

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang didapatkan daerah yang dikumpulkan menurut peraturan daerah berdasarkan peraturan undang-undang. Menurut Halim yang dikutip dalam jurnal Muhammad Nur menyebutkan bahwa, "Pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang didapatkan dari sumber ekonomi asli daerah". [36]

Dalam penelitian Muhammad Nur " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah." [37]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ada hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah yakni jika pendapatan asli daerah meningkat maka belanja daerah pun akan meningkat

5. **Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah**

Dana perimbangan adalah dana alokasi dari pemerintah pusat yang dimanfaatkan guna mendorong otonomi daerah, serta beberapa daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang terbilang kecil.[38]

Dalam penelitian Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana "pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada belanja daerah menjelaskan bahwa ada

[36] Muhammad Nur, hlm. 80.
[37] Muhammad Nur, hlm. 85.
[38] Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana, hlm. 893.

pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah.” [39] menurut penjelasan di atas, maka diketahui bahwa adanya hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja daerah yaitu apabila dana perimbangan meningkat maka belanja daerah akan meningkat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun bagian ini mengenai berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran peneliti serta menjadikan bahan pertimbangan untuk menyusun penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Tabel II.I

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Rahmat Daim Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap, Dan Meilya Evita Syari. (At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam. Volume 5. Nomor 2. Juli-Desember 2019.p-ISSN:2356-49$^{2X)}$e-ISSN: ^{2}549-9^{2}70)[40]	Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening.	Regresi linear berganda	Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening.

[39] Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana, hlm. 898.

[40]Rahmad Daim, dkk., “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel

2	Ni Made Arni Asari, dan Ketut Alit Suardana (Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, volume 25. No 2. Novomber 2018. ISSN:2302-8556).[41]	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah	Regresi Berganda	Secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
3	Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (Jurnal kajian akuntansi, volume 1. No 1, 2017).[42]	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	Regresi Berganda	Pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah serta dana perimbangan terhadap belanja daerah kota Bandung
4.	Yuriko Feridan (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013).[43]	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah *(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*	Regresi Berganda dan Uji T Statistik.	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Intervening."Volume5Nomor2(Juli2019).http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/attijaroh/article/view/1888/xml-1., 5 September 2020

[41] Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah Dalam Jurnal Akuntansi Universitas Udayana," Volume 25, No 2, (November 2018). http://doi.org/10.24843/EJA.2018.V25.i02.p03, 5 September 2010.

[42] Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", Jurnal Kajian Akuntansi" Vol. 1, (1) (2017). http://jurnal. Unswagati. ac.id/index.php/jka," 5 September 2020.

[43] Yuriko Feridan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)," 2013. ejournal.unp.ac.id, 5 September 2020.

5.	Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono (Jurnal tema telaah manajemen. Volume 6. Edisi 1, maret 2009. ISSN:1693-9727).[44]	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa tengah Tahun 2006-2008	Regresi sederhana dan regresi berganda	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Adapun persamaan atau perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini:

1. Rahmat Daim Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap, Dan Meilya Evita Syari, persamaannya yaitu pada variabel X nya membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah, pada variabel X nya sedikit berbeda pada jurnal membahas tentang Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening, serta peneliti hanya menggunakan Belanja Daerah untuk variabel X, pada jurnal runtutan waktunya selama 4 (empat) tahun 2015-2018, dan peneliti hanya 3 (tiga) tahun 2016-2018.
2. Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana, persamaannya adalah pada variabel terikatnya adalah belanja daerah, varibel bebasnya sedikit berbeda, pada penelitian jurnal terdahulu variabel bebasnya ada 3 yaitu: pengaruh

[44] Gregorius N. dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisi Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008", Jurnal Tema Telaah Manajemen, Issn 1693-9727" Vol 6 Edisi 1 (Maret 2009). http://scholar.google.co.id.," 5 September 2020.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Badung tahun 2012-2016, sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai pada jurnal ini yaitu metode *observasi non partisipan* yang bersumber dari BPKAD Kabupaten Badung, dalam metode analis sama-sama menggunakan Analisis regresi linier berganda.

3. Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, persamaannya adalah variabel bebasnya sama-sama menggunakan PAD dan Dana Perimbangan dan variabel terikatnya juga sama-sama menggunakan Belanja Daerah dan perbedaannya terdapat pada studi empiris penelitiannya pada penelitian ini studinya di Kota Bandung dan penulis meneliti studinya pada Kab/Kota Sumatera Utara, Tempat penelitiannya di kota Bandung pada tahun 2017 dalam bentuk jurnal, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian survey, serta teknik penarikan sampel yang dipakai yaitu purposive sampling. Dan penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari DJPK dipakai yaitu purposive sampling.
4. Yuriko Feridan, persamaannya adalah varibel terikatnya sama menggunakan Belanja Daerah dan perbedaan pada variabel bebasnya pada penelitian terdahulu menggunakan PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sedangkan penulis tidak menggunakan lain-lain pendapatan yang sah, jenis penelitiannya termasuk kedalam penelitian kausalitas, teknik penarikan sampel yang dipakai dengan teknik total sampling, dengan jenis data sekunder, data yang dipakai yaitu dari Laporan Realisasi APBD yang

bersumber dari BPS dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) provinsi Sumatera Barat dan Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, teknik pengumpulan menggunakan teknik dokumentasi.

5. Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono, persamaannya adalah variabel bebasnya sama-sama menggunakan PAD dan Dana Perimbangan dan sedikit berbeda pada variabel terikatnya yaitu pada jurnal membahas tentang Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* sedangkan penulis variabel terikatnya hanya belanja daerah saja, tahunnya pun berbeda pada jurnal penelitiannya pada tahun 2006-2008, peneliti meneliti pada tahun 2016-2018, dan obyek peneltiannya pun berbeda, di jurnal 35 kabupaten/kota di jawa tengah, sedangkan penulis hanya membahas beberapa kabupaten/kota di sumatera utara, serta untuk pengujian hipotesisnya pun berbeda, pada jurnal terdapat analisis regresi berganda yang bertujuan agar pengujian hipotesis pertama sampai dengan keempat, sementara itu pengujian hipotesis kelima memakai analisis regresi sederhana, penulis hanya menggunakan analisis regresi berganda.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah memahami kaitan antara variabel yang terkait dalam penelitian yang satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada deskripsi teoritis. Konsep dalam

hal ini merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian.[45]

Gambar II.1
Kerangka Pikir Penelitian

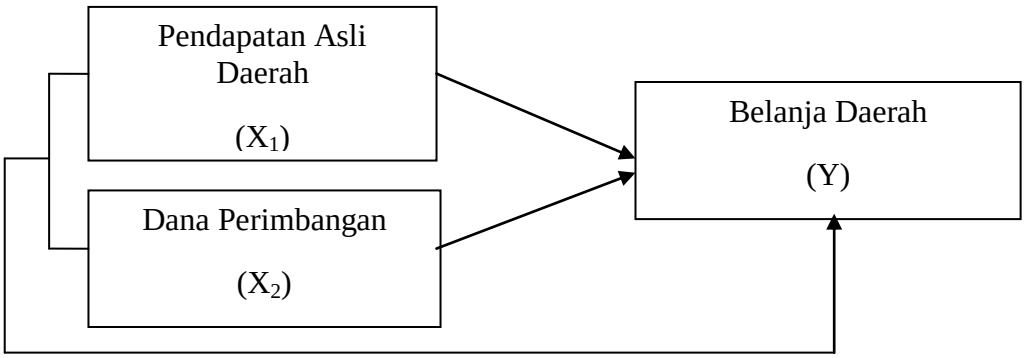

Pada gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa PAD dan Dana Perimbangan adalah salah satu yang memengaruhi belanja daerah. Dimana apabila nilai atau jumlah PAD naik atau tinggi maka anggaran untuk belanja daerah juga akan naik serta apabila PAD nilainya turun maka belanja daerah juga akan mengalami budget yang turun. Kemudian Dana Perimbangan juga memiliki pengaruh yang sama seperti halnya PAD, dimana apabila nilai Dana Perimbangan naik maka nilai dari belanja daerah akan mengalami kenaikan dan sebaliknya.

D. Hipotesis

Hipotesis yaitu yang menjelaskan kondisional tentang perbuatan, kejadian atau kondisi tertentu yang sudah terjadi ataupun akan terjadi. Hipotesis yaitu ketetapan spekulatif ataupun sementara pada penelitian.

[45]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi. Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 251.

Hipotesis termasuk hasil akhir dari proses berpikir deduktif. Logika deduktif yaitu menganut koherensi, mengingat premis termasuk informasi yang bersumber dari kenyataan yang sudah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan memiliki derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.[46] Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H_{a_1} : Terdapat pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2016-2018.

H_{a_2} : Terdapat pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2016-2018.

H_{a_3} : Terdapat pengaruh PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara Utara Tahun 2016-2018.

[46]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 76.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten serta 8 Kota. Penelitian ini dimulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan data penelitian yang bekerja dengan angka, yang di analisis dengan statistik guna menjawab hipotesis penelitian bersifat spesifik, serta untuk membuat prediksi bahwa suatu variabel mempengaruhi variabel lain.[47] Adapun angka pada penelitian ini yakni data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2016-2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup dari obyek/subyek yang memiliki kualitas serta ciri-ciri tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk diketahui serta akhirnya ditarik kesimpulan. [48] Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh data pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera

[47]Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13.

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115.

Utara yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tabel III.I
Nama-Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Asahan
2.	Kabupaten Batu Bara
3.	Kabupaten Dairi
4.	Kabupaten Deli Serdang
5.	Kabupaten Humbang Hasundutan
6.	Kabupaten Karo
7.	Kabupaten Labuhanbatu
8.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9.	Kabupaten Labuhanbatu Utara
10.	Kabupaten Langkat
11.	Kabupaten Mandailing Natal
12.	Kabupaten Nias
13.	Kabupaten Nias Bharat
14.	Kabupaten Nias Selatan
15.	Kabupaten Nias Utara
16.	Kabupaten Padang Lawas
17.	Kabupaten Padang Lawas Utara
18.	Kabupaten Pakpak Barat
19.	Kabupaten Samosir
20.	Kabupaten Serdang Bedagai
21.	Kabupaten Simalungun
22.	Kabupaten Tapanuli Selatan
23.	Kabupaten Tapanuli Tengah
24.	Kabupaten Tapanuli Utara

25.	Kabupaten Toba Samosir
26.	Kota Binjai
27.	Kota Gunungsitoli
28.	Kota Medan
29.	Kota Padangsidimpuan
30.	Kota Pematangsiantar
31.	Kota Sibolga
32.	Kota Tanjung Balai
33.	Kota Tebing Tinggi

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian jumlah serta karakteristik yang terdapat pada populasi.[49] Pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yang mana teknik penetapan sampel dengan beberapa pertimbangan yang spesifik.[50] Adapun pertimbangan yang dipakai dalam penentuan pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Kabupaten/Kota yang mengalami fluktuasi Pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera Utara.
2. Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terpublikasi di website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut terkait pemilihan sampel sebagai berikut:

[49]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian(Jakarta: Rineka Cipta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 12.

[50]Sugiyono, *Metode Penelitian Kantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 62.

Tabel III.2
Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang terpublikasi tahun 2016-2018	33
2.	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mengalami fluktuasi tahun 2016-2018	13
3.	Kabupaten/Kota yang tidak mengalami fluktuasi Pendapatan Asli Daerah di provinsi Sumatera Utara 2016-2018	20

Berdasarkan tabel III.2 di atas, maka dapat diperoleh sampel penelitian yang memenuhi kriteria terdiri dari 8 Kabupaten serta 5 Kota dengan rentan waktu selama 3 tahun sebagai berikut:

Tabel III.3
Daftar Sampel Penelitian

No	2016	2017	2018
Kabupaten			
1.	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas
2.	Kab. Labuhan batu Utara	Kab. Labuhan batu Utara	Kab. Labuhan batu Utara
3.	Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal
4.	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapanuli Tengah
5.	Kab.Nias Selatan	Kab. Nias Selatan	Kab. Nias Selatan
6.	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Pakpak Bharat
7.	Kab. Samosir	Kab. Samosir	Kab. Samosir
8.	Kab. Batubara	Kab. Batubara	Kab. Batubara
Kota			
9.	Kota. Binjai	Kota. Binjai	Kota. Binjai

10.	Kota. Padang Sidempuan	Kota. Padang Sidempuan	Kota. Padang Sidempuan
11.	Kota. Sibolga	Kota. Sibolga	Kota. Sibolga
12.	Kota. Tanjung Balai	Kota. Tanjung Balai	Kota. Tanjung Balai
13.	Kota. Tebing Tinggi	Kota. Tebing Tinggi	Kota. Tebing Tinggi

Sampel dalam penelitan ini yaitu data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2016-2018 yang dipublikasikan oleh website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id. Penelitian ini dalam rentang waktu 2016-2018 = 3 (tiga) tahun. Maka sampel penelitian 13 kabupaten/kota x 3 (tiga) tahun = 39 sampel penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data panel. Data panel adalah data yang bersifat *time series* dan *cross* section, sehingga terdiri dari beberapa objek serta terdiri atas beberapa periode. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan melalui Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder, yang dimana data sekunder yaitu data siap pakai yang dihasilkan dari sumber kedua. Data sekunder itu berupa data-data ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun dari Bank Indonesia (BI) yang telah lengkap dan tersebar luas diberbagai sumber.

Adapun teknik pengumpulan data oleh peneliti yaitu:[51] Studi dokumentasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu sekunder. Data sekunder yaitu data primer yang sudah diolah lebih lanjut serta disajikan beragam pihak baik pihak pengumpul data ataupun pihak lain. Data penelitian ini didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2016-2018 (DJPK) yang digunakan secara panel berdasarkan runtutan waktu.

F. Analisis Data

Pengelompokan data sesuai dengan variabel serta jenis responden, mentabulasi data dari variabel serta seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, membuat perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, serta membuat perhitungan untuk pengujian hipotesis yang dilakukan merupakan hal yang dilakukan dalam menganalisis data.

1. Uji Estimasi Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa metode yang dikemukakan, yaitu:

a. *Common effects model*

Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data penel dengan metode *common effects* merupakan asumsi yang berpendapat yakni intersep serta slope selalu tetap baik antar waktu ataupun antar individu. Setiap individu (n) yang diregersi bertujuan agar mengetahui

[51]Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 73.

hubungan antara variabel dependen dan variabel-variabel independennya adalah sama untuk setiap waktu.[52]

b. *Fixed effects model*

Teknik *fixed effects* adalah metode mengistemasi data panel yang mempertimbangkan kesempatan bahwa peneliti menemukan masalah *intercept time series* maupun *cross section.* Model dengan *fixed effects* menambahkan variabel *dummy*.[53]

c. *Random effects model*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hasil estimasi pada *fixed effects* memerlukan dua hipotesis yang masing-masing menerangkan bahwa slope tetap dan intersep akan berlainan baik oleh perbedaan perseorangan maupun selisih waktu. Proses estimasi untuk kedua model *fixed effects* tersebut dilakukan dengan menambahkan variabel *dummy* pada model ekonometri, yaitu variabel *dummy* untuk mengakomodasi perbedaan unit data dan perbedaan periode waktu. Pendekatan pada estimasi ini disebut *least square dummy variable.*[54] Pada model ini, diasumsikan bahwa perbedaan intersep serta konstanta disebabkan oleh residual/error menjadi dampak perbedaan antara unit serta antar waktu yang berbentuk *random*.[55]

---

[52]Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 107.

[53]Shochrul Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 51.

[54]Shochrul Ajija, dkk, hlm. 153.

[55]Shochrul Ajija, dkk, hlm. 153.

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Ada tiga uji yang dapat dikerjakan untuk menetapkan model estimasi yang paling sesuai, yakni uji *Chow* (F) untuk signifikansi *fixed effects*, uji *LM* (*Lograng Multiplier*) untuk signifikansi *random effects* serta uji hausman untuk signifikansi *fixed effects* serta *random effects*.[56]

a. Uji *Chow*

yaitu uji yang dipakai untuk menentukan antara model *common effects* atau model *fixed effects*. Hipotesis yang dipakai yaitu berikut ini:

H_0 = *common effects model* (Prob > 0.05)

H_a = f*ixed effects model* (Prob < 0.05)

b. Uji Hausman

Yaitu uji yang digunakan untuk membandingkan antara *random effects* dan *fixed effects.* Hipotesis yang dipakai pada uji ini yaitu:

H_0 = *Random effects model* (Prob > 0.05)

H_a = *Fixed effects model* (Prob < 0.05)

c. Uji LM (*Lograng Multiplier*)

Uji yang berguna membandingkan antara *common effects* serta *random effects.* Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 = *Common effects model* (Breusch-Pagan < 0.05)

H_a = *Random effects model* (Breusch-Pagan > 0.05)

[56]Shochrul Ajija, dkk, hlm. 181.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Jika jumlah observasinya kurang dari 30 maka uji yang digunakan adalah uji normalitas. Dimana uji ini dilakukan agar dapat diketahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Tidak diperlukan uji normalitas apabila jumlah observasinya lebih dari 30, namun bisa juga menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB *test*). Jika nilai *p-value*>tingkat signifikansinya maka akan residual berdistribusi normal.[57]

b. Uji Multikolinearitas

Apabila ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dalam model regresi maka digunakan uji multikolinearitas. Jika tidak terjadi korelasi antara variabel independent maka dihasilkan model regresi yang baik. Sebaliknya, jika adanya korelasi yang tinggi diatas 90% antar variabel bebas maka ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.[58]

Dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), kita juga dapat melihat apakah terdapat Multikolinearitas pada variabel bebas atau tidak.Nilai VIF > 10 adalah nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas, sedangkan nilai VIF < 10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

[57]Shochrul Ajija, dkk, hlm. 42.

[58]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 911.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang berguna mengetahui apakah ada ketidaksamaan *variance* dari residual sebuah pengamatan terhadap pengamatan lain. Dimana adanya heteroskedastisitas jika variabel gangguan tidak memiliki varian yang serupa terhadap seluruh observasi.[59] Hipotesis yang dipakai yaitu:

H_0 = Tidak terjadi heteroskedastisitas

Ha= Terdapat heteroskedastisitas

Penentuan keputusan yaitu dengan melihat perbandingan antara nilai *p-value* dengan nilai *alpha.* Adapun ketetapan yang dipakai yaitu:

p-value> α = H_0 diterima

p-value< α = H_0 ditolak

d. Uji Autokorelasi

Uji yang berguna mengetahui apakah ada penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yakni korelasi yang ada antara residual dalam sebuah pengamatan terhadap pengamatan lain dalam model regresi. Adapun hipotesis yang dipakai pada uji ini yaitu:

H_0 = Tidak terdapat autokorelasi

H_a = Terdapat autokorelasi

Adapun ketetapan yang dipakai dengan uji Durbin Watson (uji DW) yaitu:[60]:

[59]Imam Ghozali dan Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (Semarang: Uversitas Diponegoro, 2013), hlm.134.

[60]Setiawan dan Dwi Endah Kusrini, *Ekonometrika* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 82.

1) Apabila d lebih kecil dari Dl ataupun lebih besar (4-dL), hipotesis ditolak, maka ada autokorelasi.
2) Apabila d terletak antara dU serta (4-dU), hipotesis diterima, maka tidak ada autokorelasi.

Apabila d terletak dL maka du ataupun antara (4-dU) serta (4-dL), maka tidak diperoleh kesimpulan yang pasti.

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda memiliki beberapa variabel independen yakni X1, X2, X3…Xn dimana akan memengaruhi satu variabel dependen / Y. Dengan melihat kekuatan hubungan antar Belanja Daerah dengan PAD serta Dana Perimbangan dengan tujuan menguji kandungan PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Model regresi berganda umumnya ditulis dengan persamaan dibawah ini:

$$BD_{it} = a+b_1PAD_{it} + b_2DP_{it}+e_{it}$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

a = Konstanta

b_1b_2 = Koefisien Regresi untuk X1, dan X2

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

e = Faktor lain (Faktor Penggangu)

i = Tahun

t = Kabupaten/Kota

5. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik – t

Uji t berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji yang dapat membandingkan nilai *p-value* dengan α. Jika *p-value*< *α* maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika *p –value*>α maka H_o diterima.

2. Uji Statistik – F

Uji F bertujuan mengetahui apakah variabel independen secara bersama dapat memengaruhi variabel dependen. Apabila ^{F}hitung >^{F}tabel, maka Ha diterima sehingga terdapat pengaruh antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan pengambilan keputusan. Sebaliknya jika ^{F}hitung <^{F}tabel, maka Ha ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

3. Uji Koefisien Determinan (R2)

Uji koefisen determinan (R2) bertujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana kontribusi variabael independen terhadap variabel dependen.Apabila R2 dapat mendekati 1 maka dapat disebut semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis determinasi dalam regresi sederhana digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Jika Taraf signifikansi yang akan digunakanyaitu sigα <0,05. Maka R2 diperoleh dengan mengkuadratkannya melalui aplikasi SPSS 22. Untuk dapat

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat intinya dengan koefisien determinan.[61]

[61]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistika* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 185.

Gambar III.1
Kerangka Uji Penelitian

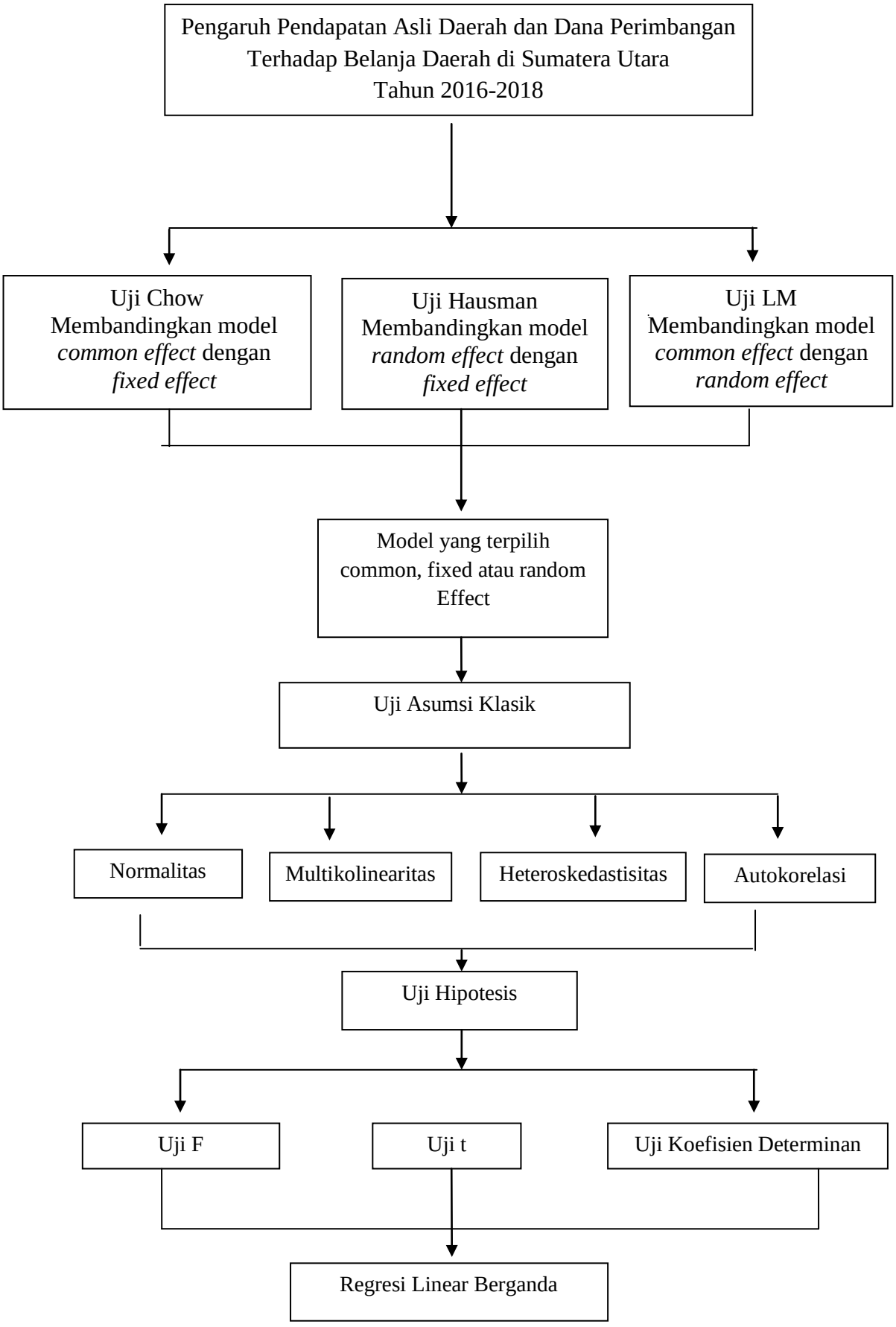

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara berdiri tanggal 15 April 1948 yang terdiri atas tiga keresidenan, yakni Sumatera Timur, Aceh, serta Tapanuli. Beribukota di Kutaraja dan sekarang di Banda Aceh dengan Gubernur pertama Mr. S.M. Amin. Menurut penemuan arkeologi, Sumatera Utara telah ditempati dari zaman Mesolitikum dan dihuni oleh kelompok yang disebut Autro Melanesoid yang banyak menempati daerah wilayah sungai. Di tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni oleh Proto Melayu yang setelahnya ditempati oleh Deutro Melayu berasal dari daerah selatan China.[62]

Sumatera Utara adalah Provinsi keempat yang penduduknya termasuk jumlah terbesar di Indonesia sesudah Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jawa Tengah.[63] Provinsi Sumatera Utara bulan desember 2018 ada 25 Kabupaten serta 8 kota. Provinsi yang berbatasan dengan daerah perairan serta laut dan dua provinsi lain: di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah timur dengan Negara Malaysa di Selat Malaka. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau serta Sumatera Barat, serta di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

---

[62]Marulamasina,"SejarahSumatera Utara," https://amp-kaskus-co.id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kaskus.co.id, 13 November 2020 pukul 11.40 WIB.

[63]BPS Provinsi Sumatera Utara, "Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018" (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018), hlm. 3.

Berdasarkan kondisi alam serta kondisi letak. Sumatera Utara terbagi atas 3 (tiga) bagian wilayah seperti Pantai Timur, Pantai Barat, serta Dataran Tinggi. Wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, serta Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi yaitu Kabupaten Toba Samosir, kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, serta Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur terdiri dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang Kabupaetn Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, serta Kota Binjai. [64]

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

a. Visi Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi Provinsi Sumatera Utara ialah:

"Sumatera Utara yang maju, aman, serta bermartabat"

b. Misi Provinsi Sumatera Utara

Adapun misi dari Provinsi Sumatera Utara ialah:

[64]BPS Provinsi Sumatera Utara, hlm. 1-2.

1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan sebab mempunyai iman serta taqwa, adanya rumah yang layak, sandang pangan yang cukup, kesehatan yang prima, pendidikan yang baik, harga-harga yang terjangkau, serta mata pencaharian yang menyenangkan.
2) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan pemerintahan yang dicintai serta bersih, tata kelola pemerintah yang adil, baik, terpercaya, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, politik yang beretika, serta mempunyai kohesi sosial yang kuat dan harmonis.
3) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan dengan masyarakatnya yang terpelajar, kolaboratif, berkarakter, berdaya saing, cerdas, serta mandiri.
4) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan yang terbebas dari narkoba, judi, penyelundupan, serta prostitusi maka menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
5) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan dengan lamnya yang bersih serta indah, ekologinya yang terjaga, berbudaya, penduduknya yang ramah, beradab, serta berperikemanusiaan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data pada penelitian dikumpulkan dari data Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang diakses melalui *website* resmi DJPK Provinsi Sumatera Utara. Data yang diakses peneliti yaitu data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2016-2018 yang akan digunakan untuk mendapatkan jumlah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap belanja daerah.

Tabel IV.I
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018

No	Nama Kabupaten /Kota	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
2016				
1.	Kab. Padang Lawas	49.991.246.695	737.068.004.160	1.015.270.384.579
2.	Kab. Labuhanbatu Utara	35.326.053.722	625.925.328.000	840.793.181.692
3.	Kab. Mandailing Natal	85.508.994.820	1.174.774.439.600	1.586.762.381.772
4.	Kab. Tapanuli Tengah	64.005.291.000	985.106.289.000	1.193.876.254.900
5.	Kab. Nias Selatan	14.110.806.475	768.553.804.000	1.093.581.486.484
6.	Kab. Pakpak Bharat	15.235.186.682	471.608.560.542	594.377.863.610
7.	Kab. Samosir	30.786.029.967	654.646.644.660	850.073.967.860
8.	Kab. Batubara	50.426.644.624	671.733.838.000	960.904.108.372
9.	Kota. Binjai	88.674.387.050	699.810.593.815	1.023.554.570.568
10	Kota. Padang Sidempuan	69.107.801.380	508.997.533.000	772.196.268.720
11	Kota. Sibolga	65.159.344.084	608.814.531.731	789.856.899.939
12	Kota. Tanjung Balai	63.898.624.189	584.353.924.000	720.036.003.766

13	Kota Tebing Tinggi	86.115.554.000	597.999.226.080	766.578.358.598
2017				
1.	Kab. Padang Lawas	52. 299.754.095	715.103.544.000	1.096.235.641.141
2.	Kab. Labuhan batu Utara	43. 182. 972.000	707.636.391.000	849.301.959.825
3.	Kab. Mandailing Natal	100.111.769.563	1.086.204.333.000	1.563.819.372.565
4.	Kab. Tapanuli Tengah	72.369.935.497	832.636.278.000	1.091.824.630.924
5.	Kab. Nias Selatan	14.160.411.140	763.539.781.854	1.147.761.807.054
6.	Kab. Pakpak Bharat	24.297.176.000	442.967.749.000	681.429.146.086
7.	Kab. Samosir	50.000.000.000	672.662.533.272	902.089.052.652
8.	Kab. Batubara	51.590.500.000	846.733.744.588	1.063.041.449.881
9.	Kota. Binjai	98.283.092.444	719.167.216.158	914.618.290.540
10.	Kota. Padang Sidempuan	91.296.998.872	680.139.010.000	836.868.161.454
11.	Kota. Sibolga	78.454.412.503	514.771.430.863	631.329.596.721
12.	Kota. Tanjung Balai	65.315.421.605	533.525.247.000	693.917.029.628
13.	Kota Tebing Tinggi	97.353.698.600	581.259.643.000	737.568.472.672
2018				
1.	Kab. Padang Lawas	59.568.272.023	708.722.298.000	1.119.938.195.760
2.	Kab. Labuhan batu Utara	51.069.120.952	697.779.268.000	871.626.646.892
3.	Kab. Mandailing Natal	117.661.769.563	1.071.095.267.000	1.562.169.384.565
4.	Kab. Tapanuli Tengah	100.000.000.000	905.749.933.000	1.221.955.189.000
5.	Kab.Nias Selatan	21.079.236.300	779.937.244.000	1.242.459.520.511
6.	Kab. Pakpak Bharat	28.169.647.917	431.431.968.000	617.103.922.495
7.	Kab. Samosir	54.289.357.980	61.530.873.200	839.153.433.708
8.	Kab. Batubara	63.225.916.173	800.414.830.000	1.075.095.304.615
9.	Kota. Binjai	136.033.147.992	725.647.284.000	961.857.047.999

10	Kota. Padang Sidempuan	93.313.756.578	656.286.589.000	843.757.926.950
11.	Kota. Sibolga	108.129.370.832	520.914.768.000	662.651.416.580
12.	Kota. Tanjung Balai	69.060.641.086	530.190.296.000	831.473.050.228
13.	Kota Tebing Tinggi	105.579.950.493	547.815.047.000	790.416.665.396

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 8 kabupaten dan 5 kota ada yang mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2016-2018, seperti Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah hanya Rp49.991.246.695 dibanding dengan jumlah Dana Perimbangan Rp737.068.004.160 yang lebih tinggi peranannya terhadap nilai Belanja Daerah sebesar Rp1.015.270.384.579 begitu juga dengan Kota Binjai yang seharusnya mampu menutupi Belanja Daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah namun masih mengandalkan Dana Perimbangan. Nilai Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp88.674.387.050 sedangkan nilai dari Dana Perimbangan Rp699.810.593.815 dengan nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp1.023.554.570.568, di kota Tebing Tinggi juga mengalami hal yang sama dimana nilai Pendapatan Asli Daerahnya Rp86.115.554.000 sedangkan nilai dari Dana Perimbangan Rp597.999.226.080 dengan nilai dari Belanja Daerah sebesar Rp766.578.358.598. Kabupaten/kota tahun 2017 juga masih

bergantung terhadap Dana Perimbangan dalam memenuhi belanja daerahnya, seperti di Kabupaten Batubara nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.590.500.000 yang masih bergantung terhadap nilai dari Dana Perimbangan sebesar Rp846.733.744.588 dengan nilai Belanja Daerah sebesar Rp1.063.041.449.881 bahkan sampai tahun 2018 juga demikian dilihat dari nilai Dana Perimbangan pada Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp1.071.095.267.000, nilai Pendapatan Asli Daerahnya Rp117.661.769.563 dan Belanja Daerahnya sebesar Rp1.562.169.384.565, Kota Padangsidempuan juga demikian jumlah Dana Perimbangannya Rp656.286.589.000, Pendapatan Asli Daerahnya Rp93.313.756.578 kemudian Belanja Daerahnya sebesar Rp843.757.926.950 dan nilai Pendapatan Asli Daerah terendah pada Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp51.069.120.952 dengan Dana Perimbangan sebesar Rp697.779.268.000 dengan Belanja Daerah Rp871.626.646.892. Hampir diseluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2016-2018 juga mengalami hal yang sama.

C. Analisis Data Penelitian

1. Uji Estimasi Data Panel

Analisis data panel yaitu mempelajari sekelompok subyek yang akan dipertimbangan baik dimensi individu data maupun dimensi waktu. Analisis regresi data panel yaitu memilih metode estimasi yang dipakai. Ada tiga model pendekatan estimasi yang dipakai dalam regresi data panel, adalah pendekatan dengan model *common effect, fixed effect,* dan *random effect.*

Ketiga model diatas selanjutnya diuji satu persatu, dibawah ini hasil uji estimasi ketiga model.

Tabel IV.2
Uji Model Estimasi

Model	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Common Effects	C	4.565645	1.041032	4.385688	0.0001
	Pendapatan Asli Daerah	-0.442494	1.076702	-0.410972	0.6835
	Dana Perimbangan	0.786456	0.148387	5.300035	0.0000
Fixed Effects	C	9.339684	7.964964	11.72596	0.0000
	Pendapatan Asli Daerah	0.358007	0.833759	0.429389	0.6715
	Dana Perimbangan	-0.011013	0.072579	-0.151742	0.8807
Random Effects	C	8.161058	7.445919	10.96044	0.0000
	Pendapatan Asli Daerah	0.828393	0.690723	1.199313	0.2382
	Dana Perimbangan	0.119785	0.067361	1.778257	0.0838

Sumber:Hasil Pengolahan Data, 2020.

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Setelah melakukan uji estimasi tabel IV.2 di atas, kemudian dipilih model estimasi yang sesuai, memilih model estimasi yang sesuai yaitu dengan memakai uji yang lain, yaitu *uji chow*, *Haustman Test* dan *Uji LM (Lagrange Multiplier).*

a. *Uji Chow*

Uji yang pertama untuk menetapkan model estimasi yang sesuai yaitu *uji chow*. Uji untuk membandingkan model *common effects* dengan *fixed effects*. Hipotesis yang dipakai pada uji ini yaitu:

H_0 = *Common effects model* (Prob > 0,05)

H_a = *Fixed effects model* (Prob < 0,05)

Tabel IV.3
Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FE
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.229763	(12,24)	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan tabel IV.3 *uji chow* di atas, nilai prob. *Cross-Section* F yaitu 0,0000 yang nilainya < 0,05 maka H_a diterima. Oleh sebab itu model yang terpilih yakni *fixed effect.* Maka setelahnya akan dilakukan uji hausman.

b. Uji Hausman

Uji selanjutnya dalam memilih model estimasi terbaik yaitu uji Hausman. Model yang akan dibandingkan dalam uji ini yaitu *random effects* dan *fixed effects.* Hipotesis yang akan dipakai pada uji ini yaitu:

H_0 = *Random Effects model* (Prob > 0,05)

H_a = *Fixed effects model* (Prob < 0,05)

Tabel IV.4
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects-Hausman Test
Equation: RE
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.435365	2	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan tabel IV.4 uji hausman di atas, nilai prob. *Cross-Section* random sebesar 0,0000 < 0,05 yang berarti H_a diterima. Oleh sebab itu model yang terpilih yakni *fixed effect.*

Uji kedua ini menunjukkan bahwa yang terpilih yaitu model *fixed effect*. Karena yang terpilih model *fixed effects*, selanjutnya dilakukan sampai dengan uji hausman. Dimana hasil uji menjelaskan bahwa model yang terbaik antara *random effects* serta *fixed effects* yaitu *fixed effects.*

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Jika jumlah observasinya kurang dari 30 maka uji yang digunakan adalah uji normalitas. Dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Uji normalitas tidak diperlukan apabila jumlah observasinya lebih dari 30, namun bisa juga menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB *test*). Jika nilai *p-value*>tingkat signifikansinya maka residual berdistribusi normal. Regresi data normal apabila nilai p > 0,05 maka distribusi data dikatakan sesuai dengan asumsi normalitas, jika p < 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal.

Gambar IV. 5
Grafik Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B)

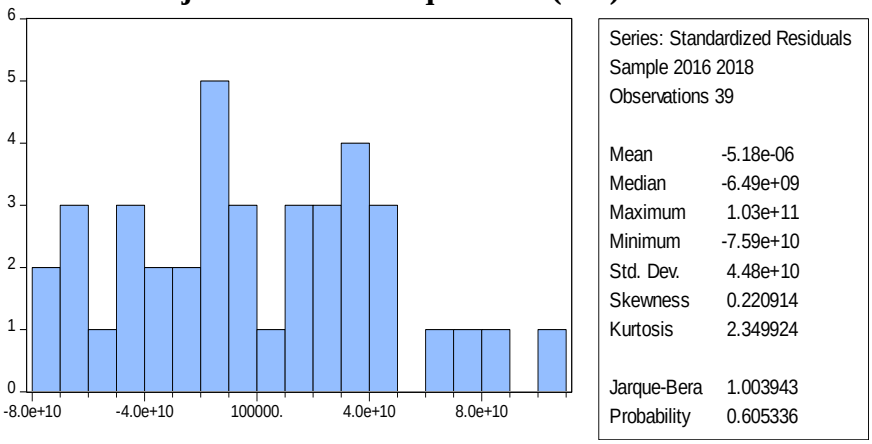

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Normalitas bisa diketahui dengan memakai uji *Jarque-Berra* (JB), uji JB adalah uji normalitas menurut koefisien kemiringan (*skewness*). Uji JB normalitas dapat diketahui dari besaran nilai *probality* JB. Apabila nilai *Probability* JB > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, nilai probabilitas JB yaitu 0,6 dimana nilai probabilitas JB > 0,05 maka residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Apabila ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas pada model regresi maka digunakan uji multikolinearitas. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independent maka dihasilkan model regresi yang baik. Sebaliknya, jika adanya korelasi yang tinggi diatas 90% antar variabel bebas maka ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.

Tabel IV.6

Hasil Uji Multikolinearitas

	Pendapatan Asli Daerah	**Dana Perimbangan**
Pendapatan Asli Daerah	1	0.346026
Dana Perimbangan	0.346026	1

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan hasil tabel IV.6 di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas akibat koefisien antara variabel independen berada dibawah 0,8 persen. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki korelasi sebesar 0,346026.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang berguna menguji apakah pada model regresi ada ketidaksamaan *variance* dari residual sebuah pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas ada jika variabel gangguan tidak memiliki yarian yang serupa untuk seluruh observasi. Hipotesis yang dipakai pada uji ini yaitu:

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan pada uji ini yaitu dengan melihat nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketetapan yang dipakai yaitu:

p-value> α = H_0 diterima

p-value< α = H_0 ditolak

Tabel IV.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pendapatan Asli Daerah	-0.026184	0.136887	-0.191284	0.8494
Dana Perimbangan	-0.025710	0.018865	-1.362817	0.1814
C	5.596898	1.323522	4.228790	0.0002

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan hasil tabel IV.7 di atas nilai probabilitas kedua variabel menunjukkan bahwa pada variabel X_1 nilai probabilitas lebih besar dari α (*alpha*) 0,05, yang mana Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,8494 serta pada variabel X_2 nilai probabilitas lebih besar dari α (*alpha*) 0,05, yang mana Dana Perimbangan yaitu 0,1814 sehingga hasilnya H_0 diterima berarti H_a ditolak serta disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini dipakai untuk mengetahui ada ataupun tidak adanya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yakni korelasi yang ada antara residual dalam sebuah pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Uji autokorelasi yang dipakai yaitu uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketetapan berikut ini:

1) Jika d lebih kecil dari dL ataupun lebih besar dari (4-dL), maka hipotesis ditolak tidak ada autokorelasi.
2) Jika d terletak antara dU serta (4-dU), maka hipotesis diterima, tidak ada autokorelasi.

2) Jika d terletak dL maka du ataupun diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak diperoleh kesimpulan yang pasti.

Tabel IV.8
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.968317	Mean dependent var	9.501877
Adjusted R-squared	0.949836	S.D. dependent var	2.518394
S.E. of regression	5.640541	Sum squared resid	7.635769
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan hasil tabel IV.8 uji di atas nilai DW yaitu 2,667156 dan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) serta jumlah data (n) = 39 dan jumlah variabel (k) = 2 didapatkan nilai dL yaitu 1,3821 serta dU yaitu 1,5969. Yang mana (4-dL) didapatkan hasil yaitu 2,6179, sebab nilai DW = 2,667156 lebih besar dari (4-dL)= 2,6179. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, maka ada autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t yaitu merupakan pengujian yang dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dapat juga membandingkan nilai *p-value* dengan α. Jika *p-value*< *α* maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika *p –value*>α maka H_o diterima.

Uji hipotesis pada penelitian ini memakai model estimasi *random effects*. Hasil uji estimasi dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	10.96044	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	1.199313	0.2382
Dana Perimbangan	1.778257	0.0838

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan tabel IV.9 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

   Dari hasil uji t dihasilkan t_{hitung} yaitu 1,199313 < dari nilai t_{tabel} yaitu 1,68830 maka H_o diterima dan H_a ditolak. Sehingga pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.

2) Dana Perimbangan terhadap belanja daerah

   Dari hasil uji t dihasilkan t_{hitung} yaitu 1,778257 > dari nilai t_{tabel} yaitu 1,68830 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.

b. Uji F (simultan)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

H_a : Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2018.

Ketentuan hipotesis dibuat dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai $F_{tabel.}$ Nilai signifikansi yang dipakai yaitu

0,05 derajat pembilang (dk_1) dihitung dengan rumus k-1, yang mana n merupakan total keseluruhan observasi serta k yaitu total keseluruhan variabel. Observasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu berjumlah 39 serta jumlah variabelnya yaitu 3, sehingga dk_1 yaitu 2 serta dk_2 yaitu 36. Nilai F_{tabel} yang didapatkan yaitu 3,26, ketetapan yang dipakai yaitu:

$F\text{-}_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima

$F\text{-}_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak

Tabel IV. 10
Hasil Uji F

F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan tabel IV.10 diatas, nilai F_{hitung} sebesar 52,39373, yang mana lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3,26 yaitu 52,39373 > 3,26, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada regresi linier berganda dipakai untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Maka peneliti ingin melihat besarnya

pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi yang dipakai yaitu nilai *R-squard.*

Tabel IV.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.968317	Mean dependent var	9.501877
Adjusted R-squared	0.949836	S.D. dependent var	2.518394
S.E. of regression	5.640541	Sum squared resid	7.635769
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan tabel IV.11 uji di atas, nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,968317 sehingga variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 96,83 persen. Sedangkan sisanya 3,17 persen di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda memiliki beberapa variabel independen yakni X1, X2, X3…Xn yang mana memengaruhi satu variabel dependen / Y. Dengan melihat kekuatan hubungan antar Belanja Daerah dengan PAD dan Dana Perimbangan dengan tujuan untuk menguji kandungan PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

Hasil estimasi yang didapatkan memakai *random effects* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.12
Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/29/20 Time: 23:41
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	8.161058	7.445919	10.96044	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	0.828393	0.690723	1.199313	0.2382
Dana Perimbangan	0,119785	0.067361	1.778257	0.0838
Cross-section random			1.250020	0.8308
Idiosyncratic random			5.640541	0.1692
R-squared	0.062214	Mean dependent var		2.395482
Adjusted R-squared	0.010115	S.D. dependent var		7.701528
S.E. of regression	7.662477	Sum squared resid		2.113688
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat		0.956954
Prob(F-statistic)	0.314676			

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Dimana :

BD : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

Persamaan regresi yang dipakai pada penelitian yaitu:

$BD_{it} = a+b_1PAD_{it} + b_2DP_{it}+e_{it}$

Berdasarkan paparan di atas, maka model regresi secara umum yaitu:

$BD_{it}= 8,161058+0,828393PAD_{it}+0,119785DP_{it}+ 7,445919_{it}$

Dari persamaan di atas dipaparkan hasil berikut ini:

a. Nilai konstanta pada persamaan penelitian ini yaitu 8,161058 artinya bahwa pendapatan asli daerah (X_1) dan

dana perimbangan (X_2) bernilai 0 maka jumlah belanja daerah hanya sebesar 8,161058 miliar rupiah.

b. Nilai koefisien pada regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,828393 bernilai positif artinya jika pendapatan asli daerah bertambah 1 persen, maka jumlah belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,828393 miliar. dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

c. Nilai koefisien pada regresi dana perimbangan sebesar 0,119785 bernilai positif artinya jika dana perimbangan bertambah 1 miliar, maka jumlah belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,119785, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

d. Nilai koefisien pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan bersama-sama signifikan mempengaruhi Belanja Daerah. Nilai F hitung sebesar 52,39373 lebih besar dari nilai F tabel 3,26.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018. Menurut ketiga hasil uji *common effect, fixed effect,* dan *random effect* maka model estimasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu model estimasi *fixed effect.* Ketiga hasil uji yang sudah dilaksanakan menjelaskan bahwa tiga hasil menunjukkan model estimasi *fixed effect* yang paling tepat.

Hasil analisis regresi linier berganda diketahui nilai konstanta pada persamaan penelitian ini yaitu 8,161058 artinya bahwa pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) bernilai 0 maka jumlah belanja daerah hanya 8,161058 miliar rupiah. Nilai koefisien pada regresi pendapatan asli daerah 0,828393 bernilai positif berarti pendapatan asli daerah bertambah 1 miliar, sehingga jumlah belanja daerah mengalami peningkatan 0,828393, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Nilai koefisien regresi dana perimbangan 0,119785 bernilai positif berarti jika dana perimbangan bertambah 1 miliar, maka jumlah belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,119785 miliar, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,968317 yang mana menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mampu menjelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana yang tidak diteliti.

Hasil interprestasi dari hasil regresi terhadap signifikansi tiap-tiap variabel yang diteliti dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan program Eviews versi 10 uji sgnifikansi parsial (uji t) maka hasil t_{hitung} yaitu 1,199313 < dari nilai t_{tabel} yaitu 1,68830 maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan teori, dimana Tulang punggung pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, kemampuan melaksanakan ekonomi mampu di ukur dari besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daaerah terhadap APBD. Jika sumbangan yang diberikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah semakin besar maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian terdahulu oleh Sari Rusmita (2016) dengan judul "pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat". Dengan nilai $-t_{statistik}$ dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar -0,085 dimana lebih kecil dari $-t_{tabel}$ yang yaitu sebesar -1,989. Sehingga H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak sebab $-t_{statistik} > -t_{tabel}$ yang tiap-tiap nilainya yaitu -1,214 > -1,989. Maka secara parsial tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Daerah.[65] Karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran atas wajib pajak serta retribusi daerah. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan menggali potensi daerah dalam meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah.

2. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah

Hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar 1,778257 > dari nilai t_{tabel} sebesar 1,68830 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dana perimbangan

[65]Sari Rusmita, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan" Vol. 5, No. 3, (2016): hlm. 254.

berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.

Penelitian ini juga didukung menurut Darise dalam jurnal Akuntansi Universitas Udayana menyebutkan bahwa dana perimbangan yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung". Dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, karena dana perimbangan adalah dana yang bersifat bantuan ataupun dana yang diperoleh dari pemberian pusat yang bertujuan mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah diwajibkan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah agar tidak tergantung terhadap dana yang didapatkan dari pemerintah pusat.[66]

3. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah

Berdasarkan uji signifikan simultan (uji F), dihasilkan F_{hitung} 52,39373 > 3,26, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya

[66]Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", Jurnal Kajian Akuntansi.", hlm. 74.

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang diterapkan dalam metodologi. Akan tetapi dalam prosesnya memperoleh hasil yang baik tidaklah mudah, karena pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan peneliti selama pelaksanaan penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam penggunaan variabel yang diteliti yaitu hanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah sementara banyak lagi variabel yang dapat diteliti.
2. Periode dalam penelitian sampel berupa data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang relative singkat, yaitu tahun 2016-2018 yang menyebabkan jumlah sampel pada penelitian ini 39 sampel.
3. Keterbatasan bahan materi seperti buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan sedikit kendala dalam teorinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018". Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018. Yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,199313 < dari nilai t_{tabel} sebesar 1,68830 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.
2. Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018. Ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar 1,778257 > dari nilai t_{tabel} sebesar 1,68830 artinya H_o ditolak dan H_a diterima. Sehingga dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018.
3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah . ini dibuktikan dari nilai F_{hitung} 52,39373 > 3,26. Artinya bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018 secara bersama-sama (simultan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan yang semoga memberikan manfaat bagi pihak ekonomi dan pihak peneliti selanjutnya tentang judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018".

1. Bagi pemerintah, banyak faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan masih ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainnya pendapatan yang sah. Guna meningkatkan belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Kepada pembaca skripsi ini diharapkan dapat memberikan kritik dan saran demi kesimpulan skripsi ini, karena keterbatasan bahan materi seperti buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini. Dan skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan baacan dunia ekonomi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, dkk. “Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan’. Jurnal Akuntasi Pemerintah” Vol. 2, No. 2 (November 2006).

Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.

Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bastian, Indra. *Akutansi Sektor Publik: Suatu PengantarAkutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006.

BPS Provinsi Sumatera Utara. “Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018.” Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Carunia Mulya Firdausy. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Dimas Dwi Anngoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.

Febdwi Suryani dan Eka Pariani. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi” Volume 6, No 1 (2018): hlm. 12.

Gregorius N. dkk. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisi Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008”, Jurnal Tema Telaah Manajemen, Issn 1693-9727” Vol 6 Edisi 1 (Maret 2009).

Halim, Abdul. *Bunga Rampai Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001.

Ida bagus badjra, dkk,. “‘Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali’, dalam jurnal akuntansi indonesia,” Volume 6, No 1, (Januari 2017).

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Imam Ghozali dan Dwi Ratmono. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Uversitas Diponegoro, 2013.

Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Irfan Ferdiansyah, dkk,. “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, dalam jurnal feb unmul,” Volume 14, No 1 (2018).

Jaka Sriyana. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi. Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Mardalis. *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Marulamasina. “Sejarah Sumatera Utara.” Https://amp-kaskus-co.id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kaskus.co.id, 13 November 2020.

Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, Jurnal Kajian Akuntansi” Vol. 1, (1) (2017).

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhammad Iqbal Dan Widhi Sunardika. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode Tahun 2009-2015)”, Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi.” Volume 9 No 1, (April 2018).

Muhammad Nur. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan” Volume 5, Nomor 1 (Juni 2015): hlm. 80.

Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah Dalam Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,” Volume 25, No 2, (November 2018).

Nihayatul Fitriana dan Sudarti Sudarti. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Ekonomi” Volume, 2 (2018): hlm. 337.

Nurul Huda dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A.P.B.D). Bandung: FOKUSMEDIA, 2012.

Rahmad Daim, dkk. “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening.” Volume 5 Nomor 2 (Juli 2019).

Rihfenti Ernayani. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah,

Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan" Volume. 1, No. 1 (2017): hlm. 45.

Sari Rusmita. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan" Vol. 5, No. 3, (2016): hal. 237-257.

Setiawan dan Dwi Endah Kusrini. *Ekonometrika*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Selemba Empat, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *Metode Penelitian Kantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian(Jakarta: Rineka Cipta*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sun'an, dan Abdurrahman senuk, Muammil. *Ekonomi Pembangunan daerah*. Jakarta: Mitra Wacna Media, 2015.

Suwandi. *Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: DeePublish, 2015.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA. *Dana Perimbangan dan pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2006.

Yuriko Feridan. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)," 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. NamaLengkap : Nur Ihsan Hasibuan
2. JenisKelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl. Lahir : Janji Manahan/22 Juli 1998
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Janji Manahan Sil
7. No. Telepon/Hp : 0812-6543-1137

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2005-2010 : SDN 100130 Janji Manahan

Tahun 2010-2013 : MTS Daarul Muhsinin

Tahun 2013-2016 : MAS Daarul Muhsinin

Tahun 2016-2021 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

C. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Paharuddin Hasibuan

Pekerjaan : Petani

NamaIbu : Yanti Liana Siregar

Pekerjaan : Petani

D. MOTTO HIDUP

"JADIKAN SEMUA AKTIVITAS MU BERNILAI IBADAH"

Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/20/20 Time: 19:29
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.565645	1.041032	4.385688	0.0001
Pendapatan Asli Daerah	-0.442494	1.076702	-0.410972	0.6835
Dana Perimbangan	0.786456	0.148387	5.300035	0.0000

R-squared	0.457755	Mean dependent var	9.501877
Adjusted R-squared	0.427630	S.D. dependent var	2.518394
S.E. of regression	1.905294	Akaike info criterion	54.85783
Sum squared resid	1.306852	Schwarz criterion	54.98579
Log likelihood	-1066.728	Hannan-Quinn criter.	54.90374
F-statistic	15.19533	Durbin-Watson stat	0.762510
Prob(F-statistic)	0.000016		

Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/20/20 Time: 19:41
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.339684	7.964964	11.72596	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	0.358007	0.833759	0.429389	0.6715
Dana Perimbangan	-0.011013	0.072575	-0.151742	0.8807

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968317	Mean dependent var	9.501877
Adjusted R-squared	0.949836	S.D. dependent var	2.518394
S.E. of regression	5.640541	Akaike info criterion	52.63326
Sum squared resid	7.635769	Schwarz criterion	53.27309
Log likelihood	-1011.349	Hannan-Quinn criter.	52.86283
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.229763	(12,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.757986	12	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/20/20 Time: 19:50
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.565645	1.041032	4.385688	0.0001
Pendapatan Asli Daerah	-0.442494	1.076702	-0.410972	0.6835
Dana Perimbangan	0.786456	0.148387	5.300035	0.0000

R-squared	0.457755	Mean dependent var	9.501877
Adjusted R-squared	0.427630	S.D. dependent var	2.518394
S.E. of regression	1.905294	Akaike info criterion	54.85783
Sum squared resid	1.306852	Schwarz criterion	54.98579
Log likelihood	-1066.728	Hannan-Quinn criter.	54.90374
F-statistic	15.19533	Durbin-Watson stat	0.762510
Prob(F-statistic)	0.000016		

Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/20/20 Time: 20:00
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.161058	7.445919	10.96044	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	0.828393	0.690723	1.199313	0.2382
Dana Perimbangan	0.119785	0.067361	1.778257	0.0838

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.250020	0.8308
Idiosyncratic random	5.640541	0.1692

Weighted Statistics

R-squared	0.062214	Mean dependent var	2.395482
Adjusted R-squared	0.010115	S.D. dependent var	7.701527
S.E. of regression	7.662477	Sum squared resid	2.113688
F-statistic	1.194154	Durbin-Watson stat	0.956954
Prob(F-statistic)	0.314676		

Unweighted Statistics

R-squared	0.151323	Mean dependent var	9.501877
Sum squared resid	2.045378	Durbin-Watson stat	0.098891

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.435365	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
Pendapatan Asli Daerah	0.358007	0.828393	0.218056	0.3138
Dana Perimbangan	-0.011013	0.119785	0.000730	0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/20/20 Time: 20:08
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.339684	7.964964	11.72596	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	0.358007	0.833759	0.429389	0.6715
Dana Perimbangan	-0.011013	0.072575	-0.151742	0.8807

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968317	Mean dependent var	9.50E+11
Adjusted R-squared	0.949836	S.D. dependent var	2.52E+11
S.E. of regression	5.6	Akaike info criterion	52.63326
Sum squared resid	7.64E+22	Schwarz criterion	53.27309
Log likelihood	-1011.349	Hannan-Quinn criter.	52.86283
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Normalitas

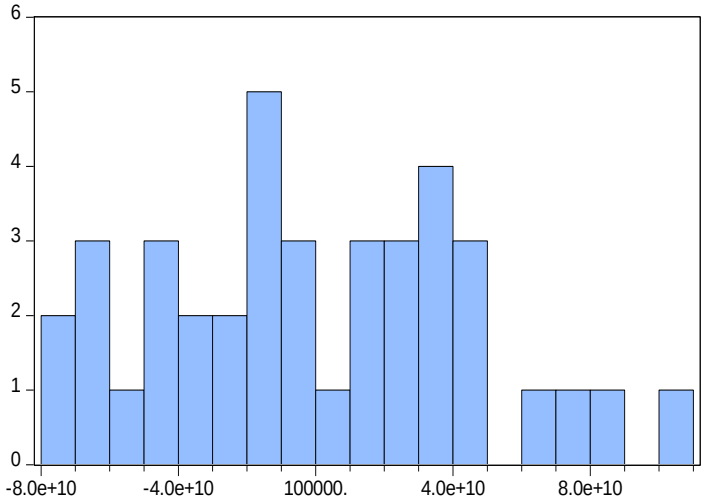

Series: Standardized Residuals
Sample 2016 2018
Observations 39

Mean	-5.18e-06
Median	-6.49e+09
Maximum	1.03e+11
Minimum	-7.59e+10
Std. Dev.	4.48e+10
Skewness	0.220914
Kurtosis	2.349924
Jarque-Bera	1.003943
Probability	0.605336

Uji Multikolinearitas

	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
Pendapatan Asli Daerah	1.000000	0.346026
Dana Perimbangan	0.346026	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 12/20/20 Time: 20:18
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 39

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.596898	1.323522	4.228790	0.0002
Pendapatan Asli Daerah	-0.026184	0.136887	-0.191284	0.8494
Dana Perimbangan	-0.025710	0.018865	-1.362817	0.1814

R-squared	0.061435	Mean dependent var	3.715933
Adjusted R-squared	0.009292	S.D. dependent var	2.433638
S.E. of regression	2.422305	Akaike info criterion	50.73282
Sum squared resid	2.112323	Schwarz criterion	50.86079
Log likelihood	-986.2900	Hannan-Quinn criter.	50.77874
F-statistic	1.178204	Durbin-Watson stat	1.390724
Prob(F-statistic)	0.319420		

Uji Autokorelasi

R-squared	0.968317	Mean dependent var	9.50E+11
Adjusted R-squared	0.949836	S.D. dependent var	2.52E+11
S.E. of regression	5.6	Akaike info criterion	52.63326
Sum squared resid	7.64E+22	Schwarz criterion	53.27309
Log likelihood	-1011.349	Hannan-Quinn criter.	52.86283
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	10.96044	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	1.199313	0.2382
Dana Perimbangan	1.778257	0.0838

Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob (F-statistic)	0.000000		

Uji Kofisien Determinasi

R-squared	0.968317	Mean dependent var	9.501877
Adjusted R-squared	0.949836	S.D. dependent var	2.518394
S.E. of regression	5.640541	Sum squared resid	7.635769
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat	2.667156
Prob (F-statistic)	0.000000		

Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	8.161058	7.445919	10.96044	0.0000
Pendapatan Asli Daerah	0.828393	0.690723	1.199313	0.2382
Dana Perimbangan	0,119785	0.067361	1.778257	0.0838
Cross-section random			1.250020	0.8308
Idiosyncratic random			5.640541	0.1692
R-squared	0.062214	Mean dependent var		2.395482
Adjusted R-squared	0.010115	S.D. dependent var		7.701528
S.E. of regression	7.662477	Sum squared resid		2.113688
F-statistic	52.39373	Durbin-Watson stat		0.956954
Prob(F-statistic)	0.314676			

Nur Ihsan - Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2016-2018

ORIGINALITY REPORT

41%	37%	20%	21%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Padangsidimpuan Student Paper	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	docobook.com Internet Source	2%
4	ejournal.unp.ac.id Internet Source	1%
5	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%